



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan Bangsa Indonesia yang masih terus diperjuangkan seluruh bangsa adalah terbebasnya dari masalah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Sejak bangsa Indonesia merdeka, ketiga masalah tersebut mendapatkan perhatian yang cukup serius dari seluruh bangsa ini. Dari ketiga permasalahan tadi antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan erat, namun pada umumnya sepakat bahwa kebodohan adalah mata rantai utama dan pertama yang harus ditangani, selanjutnya adalah kemiskinan. Sejak awal tahun 1994 istilah kemiskinan dan upaya pengentasannya dimunculkan kembali baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Seminar, lokakarya, simposium, dan pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya serta aksi-aksinya banyak dilakukan. Semua instansi dan departemen memiliki jaringan atau program terhadap masalah kemiskinan ini. Pertama kita mengenal program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Peningkatan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), kemudian pada akhir-akhir ini sedang digalakan program, Kelompok Pembelajaran Swadaya Masyarakat, (KPSM), dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Menurut data pemerintah (Depdikbud, 1998), penduduk yang tergolong miskin terus menerus menurun. Pada awal kemerdekaan, jumlah penduduk miskin berkisar 90% kemudian rentang waktu antara awal kemerdekaan sampai pelita I

tercatat 40%, sedangkan hasil sensus penduduk tahun 1990 jumlah penduduk miskin 27,2 juta jiwa atau 15,14%. Pada tahun 1995 berjumlah 21,1 juta atau 10% dari jumlah penduduk Indonesia, sehingga diperkirakan kita akan terbebas dari kemiskinan pada tahun 2006 tetapi ternyata keadaan tidak terduga tidak dapat terelakan dimana negara kita dilanda krisis moneter pada awal tahun 1997 hingga saat ini, jumlah penduduk yang miskin prosentasenya naik sangat tinggi yaitu dari beberapa sumber mengatakan angka 83 juta jiwa atau 45 %. Pada kondisi seperti ini, semua kekuatan bangsa perlu mencurahkan perhatiannya sehingga terlihat paradigma atau konsep pembangunan kita berubah dari aktivitas *pembangunan, pemberdayaan*, kepada aktivitas *penyelamatan, penyembuhan (recovery)* dan kembali ke aktivitas *pembangunan*.

Kemiskinan menurut pandangan Selo Sumardjan, (dalam Depdikbud 1999;3) diistilahkan dengan kemiskinan struktural yaitu sebagai kemiskinan yang diderita oleh golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Yang termasuk golongan ini diantaranya para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, petani pemilik tanah yang terlalu sempit sehingga hasilnya tidak mencukupi kebutuhan makan sendiri dan keluarganya, kaum buruh yang tidak terpelajar dan terlatih, pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas pemerintah. Pada sisi lain dikenal juga istilah kemiskinan absolut yaitu situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makan, pakaian, dan perumahan, yang sangat diperlukan untuk mempertahankan kehidupan minimal. Pada sisi lain, Parwoto, (1998),

melihatnya bahwa kemiskinan juga dapat dilihat dari segi pendapatan dan pengeluaran belanja, tingkat kesejahteraan sosial, dan proses pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Secara konseptual kemiskinan telah dipahami dengan pengertian yang terus berubah dan berkembang cakupannya. Kemiskinan ditanggapi tidak hanya sekedar sebagai kondisi ketidakadaan harta. Malik Fajar (1998) memberikan gambaran bahwa kemiskinan dapat dilukiskan sebagai suatu sistem jaringan (poverty web) dan dalam jaringan itu terangkai kondisi-kondisi atau kualitas yang serba tidak menguntungkan bagi kehidupan manusia yang bermartabat, yang terangkai dalam jaringan kemiskinan adalah :

1. Tidak memiliki peluang untuk mendapatkan modal dan kredit, tidak memiliki infrastruktur dan peluang untuk mendapatkan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya.
  2. Tekanan penduduk, degradasi lingkungan sebagai akibat eksploitasi secara berlebihan.
  3. Rendah penghasilan, tingkat konsumsi, indikator-indikator sosial, rendah kedudukan sosialnya, dan mengalami marginalisasi, bentuk dan kondisi perumahannya, serta tidak memiliki sanitasi, tidak bisa mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
  4. Rendah daya kemampuannya untuk menjadi tenaga kerja, rendah produktivitasnya, kurang daya tanggapnya, kurang bisa memanfaatkan pelayanan-pelayanan (kebutuhan) dasar yang tersedia, dan tenaga kerja anak-anak.
  5. Rendah rasa harga diri, fatalisme, diselimuti tahyul-tahyul, masa bodoh, kurang percaya diri, dan hidup tidak teratur.
  6. Mengidap kemelaratan, mengalami keterampasan (sosial, kultur, politik, ekonomi, dan sebagainya). Diskriminasi, pengucilan, kurang mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tidak memiliki jaminan untuk mendapatkan tambahan penghasilan.
  7. Tidak sehat, kurang nutrisi, mengidap berbagai penyakit, harapan hidup rendah, kematian bayi tinggi, dan jumlah anggota keluarga besar.
  8. Buta aksara (fungsional) tingkat pendidikan rendah, kurang memiliki akses terhadap informasi dan kesehatan, keluarga berencana dan ekonomi pasar.
- Majalah Diklusepora, (Nomor 2 th. 1998;23-27)

Kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan merupakan musuh kita bersama, dan yang paling tidak harus kita tekan seminimal mungkin. Upaya penanganannya memerlukan pemikiran dan kerangka konseptual serta aksi-aksi yang nyata dan menyentuh akar permasalahan. Philip H. Coombs dan Manzoor Akhmed (1989) berkeyakinan bahwa program-program pendidikan luar sekolah memiliki peran yang strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ruwiyanto, (1994;1) mengemukakan bahwa “pendidikan masyarakat merupakan salah satu penemuan paling menentukan dalam abad ini yang lebih hebat dari pendidikan formal, belum dihargai sebagaimana seharusnya. Pendidikan nonformal (pendidikan luar sekolah) dapat digunakan dengan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, untuk segala strata ekonomi, strata sosial, dan strata pendidikan disamping dapat pula untuk ikut memecahkan masalah-masalah kemanusiaan yang mendesak atau meresahkan”.

Permasalahan yang diuraikan terdahulu merupakan masalah yang bersifat umum dan nasional, pada tingkat lokal pun demikian seperti di Jawa Barat dimana kegiatan penelitian ini dilakukan. Di Jawa Barat yang merupakan daerah penyangga ibu kota memiliki masalah tersendiri penduduk dan segala implikasinya merupakan masalah yang kompleks. Menurut hasil susenas 1997, penduduk Jawa Barat telah mencapai 40,186 Juta orang yang sebagian besar merupakan kelompok usia produktif, dengan proporsi penduduk pada kelompok 15-64 tahun mencapai 63,48 %, golongan penduduk pada kelompok ini sudah termasuk pada kelompok usia kerja yang terdiri dari kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Berkenaan

dengan ketenagakerjaan masalah-masalah yang dihadapi seperti yang tercantum pada pokok-pokok reformasi pembangunan Jawa Barat tahun 1999/2000 adalah :

Apabila dilihat latar belakang pendidikannya menurut lapangan kerja utama sebagian besar berpendidikan rendah, di sektor primer lebih dari 94,37 % pada tahun 1996 latar belakang pendidikan pekerja adalah SD ke bawah, sedangkan pada sektor sekunder dan tersier pekerja latar belakang pendidikan sekolah lanjutan.

Perkembangan angkatan kerja di Jawa Barat periode 1990 – 1996 rata – rata setiap tahunnya mencapai 3,7 % dan pada tahun 1996 besarnya jumlah angkatan kerja adalah 16,3 juta orang dengan latar belakang pendidikan sebagian besar SD ke bawah. Sedangkan angka pengangguran Jawa Barat pada tahun 1996 sebesar 6,91 % meningkat cepat menjadi 7,38 % pada tahun 1997, sampai akhir september 1998 jumlah pengangguran di Jawa Barat sebanyak 1.715.059 orang termasuk yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 64.299 orang dan tenaga kerja yang dirumahkan sebanyak 10.507 orang. Pokok-pokok Reformasi Jawa Barat, (1999/2000)

Terlihat bahwa berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan di Jawa Barat tersebut disamping tingginya angka pengangguran juga rendahnya tingkat pendidikan, baik yang terdapat pada penduduk pencari kerja maupun yang sudah bekerja. Tingginya angka pengangguran merupakan beban yang cukup serius bila tidak ditangani secara seksama. Pengangguran disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor ekonomi, maupun sosial. Ruwiyanto, (1994:3) mengemukakan bahwa penyebab pengangguran adalah perubahan struktur industri, ketidakcocokkan keterampilan, ketidakcocokan geografis, pergeseran demografis, kekuatan industri tidak bisa dipekerjakan, restrukturisasi kapital, dan ketidakcocokkan keterampilan sebagai salah satu penyebab pengangguran itu adalah masalah pendidikan. Ketidakcocokkan keterampilan yang utama disebabkan oleh keterlambatan

penyesuaian program-program pendidikan atas valatisasi lingkungan sehinggaantisipasi pendidikan terhadap kebutuhan nyata (real need) lingkungan meleset.

Jumlah pengangguran yang tinggi akan berakibat pada kerawanan sosial dan stabilitas nasional. Penanganan masalah ini tidak bisa hanya ditangani oleh satu lembaga atau instansi saja, tetapi perlu melibatkan berbagai instansi atau lembaga baik pemerintah maupun di luar pemerintah yang berada di pusat sampai ke daerah.

Populasi penduduk yang berusia muda (produktif) jumlahnya cukup banyak 63,48%, dari kelompok ini yang berusia 15 – 35 tahun jumlahnya cukup banyak walaupun di Jawa Barat belum ada data yang pasti. Penduduk usia muda atau sering disebut pemuda berusia antara 15 – 35 tahun merupakan usia penduduk yang potensial dan memiliki kedudukan yang strategis dalam menopang kelangsungan bangsa. Untuk itu pembinaan dan pengembangan kelompok usia ini merupakan sesuatu yang strategis pula. Berkenaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan, secara tegas diuraikan dalam pola umum pembinaan dan pengembangan pemuda sebagai berikut :

Dilihat dari segi pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya, maka pemuda harus dibina dan dikembangkan sebaik-baiknya untuk menghadapi masa depan yang sehat dengan bekal yang tertanam sebagai suatu generasi yang tangguh dan bertanggungjawab, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta tanah air dan bangsanya, memiliki wawasan dan pandangan nasional yang sejalan dan serasi dengan moral pancasila.

Sebagai objek pembinaan dan pengembangan, pemuda masih memerlukan upaya-upaya yang dapat menumbuhkan potensi kemampuannya ke tingkat yang optimal sehingga dapat bersikap mandiri. Sikap itu diperlukan untuk melibatkan diri bersama potensi lainnya dalam rangka kehidupan berbangsa, bernegara dan pembangunan nasional.

Sedangkan sebagai subjek pembinaan dan pengembangan, pemuda telah memikliki bekal dan kemampuan serta landasan untuk dapat bersikap mandiri dalam keterlibatannya secara fungsional bersama potensi lainnya untuk

menyelesaikan masalah-masalah yang tengah dihadapi bangsa dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara serta pembangunan nasional. Sebagai subjek pemuda mampu mengambil prakarsa sendiri dalam keterlibatannya tersebut. Depdikbud, (1994;2)

“Pola pembinaan dan pengembangan kepemudaan adalah suatu model pendekatan dan pelatihan kepemudaan, bimbingan, pengawasan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan teratur serta bertanggungjawab untuk memperkenalkan, menumbuhkan dan membimbing dasar kepribadian yang utuh, selaras, serasi dan seimbang”. Pemda Jabar, (1991). Sedangkan sasaran pembinaan dan pengembangan kepemudaan di Jawa Barat meliputi :

- a. meningkatkan keterampilan para pemuda putus sekolah dan pencari kerja, untuk memberikan kemampuan berwirausaha secara mandiri;
- b. meningkatkan wawasan dan pengetahuan para pemuda melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah;
- c. tumbuhnya disiplin pribadi, sosial dan nasional serta etos kerja dan kemandirian;
- d. tercapainya sikap mental dan moral pemuda yang tangguh serta memiliki ketahanan nasional;
- e. meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pemuda dalam menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. berkembangnya fungsi dan peran organisasi kemasyarakatan fungsional pemuda yang mandiri, berkualitas dan dinamis;
- g. mengembangkan sarana dan prasarana pembinaan dan pengembangan kepemudaan disetiap daerah tingkat II;
- h. tertatanya kehidupan organisasi kemasyarakatan fungsional pemuda, organisasi kepemudaan lainnya seperti Karang Taruna, Pramuka, OSIS, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku. Pemda Jabar, (1991)

Lain dasar operasional lain pula tampilan pemuda kenyataannya, seperti yang kita amati saat ini, permasalahan yang berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan pemuda saat ini begitu kompleks, organisasi kepemudaan dan

lembaga atau instansi yang ada saat ini yang menangani kepemudaan tidaklah cukup berhasil mengimplementasikan apa yang telah dirumuskan di muka, guna mengatasi masalah-masalah yang berkenaan dengan kepemudaan.

Atas dasar kondisi objektif tersebut maka usaha pengembangan kemandirian dan kewirausahaan pemuda adalah layak dan mendesak untuk dilakukan melalui program-program yang realistis yang bermuara pada peningkatan produktivitas. Dewan Produktivitas Nasional (1983) mendefinisikan sumber daya manusia yang produktif adalah yang mempunyai sikap mental yang selalu mempunyai pandangan mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sedangkan National Productivity Board Singapore mendefinisikan produktivitas sebagai sikap mental (*attitude of mind*) yang mempunyai semangat melakukan peningkatan atau perbaikan. BPKB Jayagiri, (1997;9-12). Sikap mental yang produktif itu antara lain ; (1) motivatif, (2) disiplin, (3) kreatif, (4) inovatif, (5) dinamis, (6) profesional, (7) berjiwa kejuangan.

Untuk menjawab tantangan dan penyiapan sumber daya manusia maka kalangan generasi muda perlu ditumbuhkan kemampuan bersaing secara positif. “Produktivitas juga diartikan sebagai menghasilkan lebih banyak dan berkualitas lebih baik dengan usaha yang sama”, Mahmud (1997;9). Dengan demikian produktivitas adalah efisiensi proses menghasilkan dari sumber daya yang dipergunakan. Dilihat dari segi psikologi produktivitas adalah suatu tingkah laku, produktivitas menunjukkan tingkah laku sebagai keluaran (*out put*) dari suatu proses berbagai macam komponen kejiwaan yang melatar belakanginya, Panji Anoraga



(1992;51). Hal ini berarti kalau kita berbicara tentang tingkah laku manusia atau individu, yaitu tingkah laku produktivitasnya, lebih khususnya lagi dibidang kerja atau organisasi kerja kelompok pemuda produktif umpamanya.

Bertambahnya pengangguran termasuk didalamnya angkatan kerja potensial akan membawa dampak negatif apabila tidak dibina dan disalurkan dengan baik, bahkan akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan sehingga mengganggu proses pembangunan bangsa. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dirancang suatu program pendidikan dan latihan yang inovatif yang mendorong pemuda sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan usaha, yang pada akhirnya memperoleh penghasilan atau pendapatan yang layak. Program-program pendidikan luar sekolah yang inovatif baik dilihat dari isi, proses pembelajaran, adalah merupakan suatu tuntutan yang mutlak dalam upaya ikut menyehatkan bangsa ini agar kita dapat kembali membangun dan mengejar ketertinggalan dengan negara lain.

Inovasi program atau gagasan baru program adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan program-program baru yang lebih efektif, efisien, dan produktif untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Inovasi program perlu dilakukan sebagai upaya proaktif untuk menanggapi secara arif dan bijaksana terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dimasyarakat, sebagaimana kita mengetahui bahwa *yang selalu tetap adalah perubahan itu sendiri*. Di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Jayagiri dan dibeberapa SKB di Jawa Barat, upaya pembinaan generasi muda salah satunya melalui program pendampingan warga belajar program Kelompok Pemuda Produktif (KPP) dalam Pengelola Usaha

Kecil. Program Pendampingan warga belajar Kelompok Pemuda Produktif ini ada dan dikembangkan dengan dasar pemikiran bahwa hasil pengamatan dalam rangka identifikasi kebutuhan pengembangan menunjukkan bahwa masih banyaknya program-program kepemudaan khususnya program Kelompok Pemuda Produktif yang kurang berhasil diantaranya disebabkan oleh kurangnya pembinaan dan adanya kesenjangan komunikasi antara warga belajar, pengelola di tingkat kelompok dengan pembina atau penyelenggara program KPP. Program KPP saat ini telah cukup banyak berkembang khususnya di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Jawa Barat dan BPKB Jayagiri Bandung, di pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) binaan Bidang Pendidikan Masyarakat, juga program serupa yang ditangani oleh Bidang Pembinaan Generasi Muda Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat. Pengertian Pendampingan Warga belajar Kelompok Pemuda Produktif adalah :

Program Pendampingan warga belajar Kelompok Pemuda Produktif (KPP) dalam pengelolaan usaha kecil adalah usaha atau upaya seseorang yang menyertai dan menemani secara dekat, bersahabat, dan bersaudara serta terlibat bersama-sama dalam suka dan duka, saling bahu membahu dalam mengelola usaha kecil yang dilaksanakan pada kelompok pemuda produktif untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan, yaitu usaha kecil yang maju dan berkembang, sehingga warga belajar memiliki mata pencaharian yang tetap dan akhirnya mandiri serta memperoleh pendapatan yang layak BPKB Jayagiri, (1999)

Sedangkan menurut Binaswadaya (1999;1-2) mengemukakan bahwa pendampingan adalah “pihak yang berdekatan, samping menyamping, karena kedudukan antara keduanya sejajar atau sederajat, tidak ada bawahan atau pun atasan”. Hal ini mengandung implikasi bahwa pendamping hanya bisa memberikan

alternatif rekomendasi, dalam rangka pengembangan individu atau kelompok, dan ia tidak bisa mengambil keputusan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendamping itu sendiri sebagai suatu proses pembelajaran yang partisipatif dan demokratis. Proses pembelajaran kelompok pemuda produktif dengan tiga fase pembelajaran yaitu ; (1) fase pembekalan, dilakukan melalui pelatihan, (2) fase swakarsa, dilakukan dengan pemagangan, dan (3) fase swadaya, yaitu kegiatan tindaklanjut merupakan kegiatan pemandirian warga belajar, Untuk mencapai kemandirian itu perlu atau membutuhkan pendamping, yang mampu memerankannya secara baik yaitu secara demokratis dan partisipatif. Berangkat dari pengembangan prinsip individu warga belajar dan KPP pada umumnya. Maka menurut Dit Diktentis Depdikbud (1999;13) proses pendampingan itu harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

(a) pendampingan merupakan proses penyadaran diri bagi semua pihak yang terlibat, (b) berkeyakinan bahwa kelompok dampingan, dalam dirinya mampu berkembang sesuai tujuannya, (c) kegiatan pendampingan bermaksud menciptakan situasi yang mendukung perkembangan kelompok, (d) pendekatan pendampingan berangkat dari lapisan paling bawah, (e) pendekatan pendampingan bermaksud menciptakan situasi yang mendukung perkembangan kelompok, (f) pendamping berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya, (g) pendampingan dilaksanakan melalui kelompok dalam kelompok, artinya pendampingan bukan secara pribadi tetapi atas nama suatu institusi, (h) pendampingan memprioritaskan pada partisipasi, kesetiakawanan, dan kewaspadaan. Dit Diktentis Depdikbud (1999;13)

Tujuan utama yang ingin diperoleh dari program pendampingan warga belajar pada program Kelompok Pemuda Produktif (KPP) dalam pengelola usaha kecil adalah, membantu warga belajar melalui proses pembelajaran agar dapat: (1) meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menguasai keterampilan

berusaha, (2) membantu warga belajar agar memiliki mata pencaharian yang tetap dan produktif sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya, (3) memberikan kesempatan belajar pada warga belajar untuk memperoleh keterampilan berusaha pada kelompok pemuda produktif.

Berdasarkan uraian terdahulu, selintas terlihat betapa pentingnya peranan pembelajaran melalui pendampingan dalam keberhasilan program kelompok pemuda produktif, sehingga timbul pertanyaan bagaimana proses pembelajaran melalui pendampingan warga belajar pada program kelompok pemuda produktif (KPP) dalam pengelolaan usaha kecil, serta bagaimana hasilnya dari program tersebut ? akan dicoba diungkap lebih jauh melalui suatu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti model pembelajaran Kelompok Pemuda Produktif (KPP) melalui pendampingan dalam pengelolaan usaha kecil di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Hikmah Kabupaten Garut.

Untuk membantu warga belajar pada program Kelompok Pemuda Produktif (KPP) peran pendamping dalam pendampingan tersebut sangatlah penting, apakah pendampingan sudah berjalan secara sempurna sesuai dengan programnya atau belum, serta bagaimana dasar pemikiran penerapan model tersebut, bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya, serta apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan model pembelajaran KPP melalui pendampingan dalam pengelolaan usaha kecil ini. Pertanyaan tersebut memerlukan jawaban yang rinci, sehingga diperlukan upaya penelitian yang mendalam untuk memperoleh jawabannya. Dengan diperolehnya gambaran rinci tentang model pendampingan warga belajar pada

program Kelompok Pemuda Produktif (KPP) dalam pengelolaan usaha kecil, diharapkan akan ditemukan kelebihan dan kekurangannya sehingga pada gilirannya diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembang, penyelenggara, dan pihak lain yang memiliki kepedulian pada program-program Diklusepora khususnya program Kelompok Pemuda Produktif (KPP).

## **B. Identifikasi masalah**

Kegiatan penyelenggaraan kelompok pemuda produktif (KPP) di beberapa daerah tertentu dari 23 SKB di Jawa Barat saat ini masih belum berhasil berdasarkan hasil tinjauan dan telaahan BPKB Jayagiri (1999), dalam rangka identifikasi kebutuhan pengembangan kelompok pemuda produktif, hasil evaluasi kinerja SKB se Jawa Barat tahun 1998/1999. Hal tersebut juga dialami oleh oleh program KPP yang diselenggarakan di PKBM Nurul Hikmah yang merupakan binaan SKB Garut. Permasalahan tersebut antara lain; (1) belum optimalnya peran-peran tenaga kependidikan yang terlibat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program KPP, (2) terbatasnya dukungan peralatan dan modal yang ada, (3) analisis pemilihan jenis usaha tidak tepat, (4) tingkat keutuhan warga belajar atau tingkat drop out warga belajar tinggi, (5) Penguasaan keterampilan oleh warga belajar sebagai dampak dari keikutsertaan pada program KPP masih rendah, antara lain disebabkan oleh singkatnya proses kegiatan KPP, (6) lulusan program KPP yang memiliki usaha sangat kecil. Setelah dianalisis oleh suatu tim pengembang, diasumsikan perlu ada “rekayasa” model pembelajaran KPP khususnya dalam proses pembelajaran

dirasakan perlu ada seorang atau lebih yang berperan sebagai pendamping bagi WB. Maka pada perjalanan selanjutnya dilakukan kegiatan pengembangan yang memfokuskan pada pendampingan terhadap warga belajar program Kelompok Pemuda Produktif (KPP). Semakin banyak model pembelajaran KPP yang inovatif dikembangkan maka semakin banyak pilihan bagi penyelenggara program KPP untuk memilih model pembelajaran yang paling tepat untuk memberikan layanan pembelajaran terbaik kepada sarannya.

Persoalannya sekarang apakah program KPP dengan menerapkan model pembelajaran KPP melalui pendampingan tersebut cukup berhasil untuk mengoptimalkan kegiatan KPP sehingga dapat mengantarkan pemuda menjadi seorang pemuda yang mandiri. Pada sisi lain model-model pembelajaran tersebut belum banyak diketahui oleh para penyelenggara program KPP baik di lingkungan SKB maupun PKBM yang ada sekarang ini khususnya di wilayah Kabupaten Garut dan Jawa Barat pada umumnya.

### **C. Perumusan masalah dan Pertanyaan Penelitian**

#### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan terdahulu maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah

*Bagaimana Model Pembelajaran Kelompok Pemuda Produktif (KPP) melalui pendampingan dalam Pengelolaan Usaha Kecil di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Hikmah Kabupaten Garut.*

## 2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan terdahulu maka pertanyaan penelitian meliputi :

- a. Bagaimana dasar pemikiran penerapan model pembelajaran Kelompok Pemuda Produktif (KPP) melalui pendampingan dalam pengelolaan usaha kecil ?
- b. Bagaimana model pembelajaran Kelompok Pemuda Produktif (KPP) melalui pendampingan dalam pengelolaan usaha kecil ?
- c. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan model pembelajaran Kelompok Pemuda Produktif (KPP) melalui pendampingan dalam pengelolaan usaha kecil ?

## D. Definisi Operasional

### 1. *Dasar Pemikiran*

Dalam penelitian ini yang dimaksud *dasar pemikiran* adalah alasan, pangkal, suatu pendapat hasil kajian atau pemikiran yang mendasari diterapkannya model pembelajaran KPP melalui pendampingan dalam pengelolaan usaha kecil pada KPP Konveksi Limbah Kulit di PKBM Nurul Hikmah Kabupaten Garut.

### 2. *Model*

Secara khusus istilah *model* diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan Panji Anoraga

(1994; 3) dalam pengertian lain *model* juga diartikan sebagai barang atau benda tiruan dari benda yang sesungguhnya, seperti *Globe* adalah model dari tempat kita hidup. *Model* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pola dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan W.J.S poerwadarminta, (1994). Sedangkan istilah model pembelajaran (*models of teaching*), menurut Joice dan Weil (1986), digunakan untuk menunjukkan sosok untuk konseptual dan aktivitas pembelajaran yang secara keilmuan dapat diterima dan secara operasional dapat dilakukan. Dalam penelitian ini *model* adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam pengorganisasian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan pendampingan pada Kelompok Pemuda Produktif

### **3. Pembelajaran**

Adalah sebagai upaya yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk menciptakan kondisi-kondisi agar terjadi kegiatan belajar membelajarkan, dalam kegiatan ini terjadi interaksi yang edukatif antara peserta didik (warga belajar) dengan pendidik (fasilitator, pendamping, nara sumber teknis, dan tenaga kependidikan lainnya)

### **4. Pendampingan**

Adalah cara kerja seseorang yang menyertai dan menemani secara dekat, bersahabat dan bersaudara serta terlibat bersama dalam suka dan duka, saling bahu membahu bersama warga belajar. BPKB Jayagiri (1999;4) Program Pendampingan warga belajar Kelompok Pemuda Produktif (KPP) dalam



pengelolaan usaha kecil adalah usaha atau upaya seseorang yang meyakini dan menemani secara dekat, bersahabat, dan bersaudara serta terlibat bersama-sama dalam suka dan duka, saling bahu membahu dalam mengelola usaha kecil yang dilaksanakan pada kelompok pemuda produktif, untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan, yaitu usaha kecil yang maju dan berkembang, sehingga warga belajar memiliki mata pencaharian yang tetap dan akhirnya mandiri serta memperoleh pendapatan yang layak. BPKB Jayagiri, (1999;8-10).

Binaswadaya (1999;1-2) mengemukakan bahwa pendampingan adalah pihak yang berdekatan, samping menyamping, karena kedudukan antara keduanya sejajar/sedarajat, tidak ada bawahan atau pun atasan. Hal ini mengandung implikasi bahwa pendamping hanya bisa memberikan alternatif/rekomendasi, dalam rangka pengembangan individu atau kelompok, dan ia tidak bisa mengambil keputusan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendamping itu sendiri sebagai suatu proses pembelajaran yang partisipatif dan demokratis.

##### **5. *Kelompok Pemuda Produktif***

Adalah sebagai seperangkat kegiatan usaha dan tindakan pembelajaran terhadap sekelompok pemuda secara sadar, terencana, terarah, serta bertanggungjawab mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sehingga dapat mencari dan menciptakan lapangan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan pasar. Kelompok Pemuda Produktif (KPP) dalam penelitian ini adalah sejumlah pemuda (5-10) orang yang berusia 15-30 tahun,

yang menghimpun diri dalam suatu kelompok untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan kegiatan usaha (pengelolaan Usaha).

#### **6. *Pengelolaan***

Adalah kegiatan pengaturan atau pengurusan (Depdikbud,1997;2), yang dimaksud dengan pengelolaan disini adalah upaya menggerakkan kegiatan atau upaya mengurus dan melaksanakan mencakup; (1) mengatur pekerjaan atau kerjasama yang baik untuk mencapai sasaran, (2) berwenang dan bertanggungjawab membuat rencana, mengatur, memimpin, mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha untuk mencapai sasaran. ***Pengelolaan*** dalam penelitian ini adalah pengaturan atau pengurusan kegiatan atau pekerjaan baik produksi, jasa, dagang, dan lain-lain yang dilaksanakan sebagai sumber penghasilan dengan memerlukan atau menggunakan modal kecil. Kegiatan dan jenis usaha yang dikelola adalah usaha dibidang konveksi bahan limbah kulit (bahan sisa jahitan dari industri garment yang menggunakan bahan dari kulit).

#### **7. *Usaha Kecil***

Kegiatan atau pekerjaan baik produksi, jasa, dagang, dan lain – lain yang dilaksanakan sebagai sumber penghasilan dengan memerlukan atau menggunakan modal kecil. Dit. Diktentis,(1997).

#### **8. *Faktor Pendukung dan Penghambat***

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan ***Faktor Pendukung dan Penghambat*** adalah suatu keadaan dan sebagainya yang menyebabkan atau mempengaruhi pelaksanaan dan hasil penerapan model pembelajaran KPP

melalui pendampingan dalam pengelolaan usaha kecil pada KPP Konveksi Limbah Kulit di PKBM Nurul Hikmah Kabupaten Garut. Baik itu yang bersifat pendukung, (kekuatan, tantangan, dan peluang) maupun penghambat (kelemahan) baik dari dalam KPP maupun dari luar KPP.

#### **9. Konveksi Bahan Limbah Kulit**

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan **Konveksi Bahan Limbah Kulit** adalah suatu kegiatan usaha produksi barang hasil jahitan berupa jaket, rompi, sarung tangan, tas sekolah, topi, ikat pinggang, dan tas pinggang, yang bahan baku utamanya berasal dari limbah kulit. Sedangkan limbah kulit itu sendiri adalah kulit olahan sisa produksi (seplit) yang bagi sebagian pabrik karena bukan merupakan tujuan produksi maka menjadi buangan, sedangkan bagi KPP konveksi bahan limbah kulit di PKBM Nurul Hikmah merupakan bahan baku utama.

Dari Uraian tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud model pembelajaran Kelompok Pemuda Produktif (KPP) melalui pendampingan dalam pengelolaan usaha kecil, adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam pengorganisasian kegiatan untuk mencapai tujuan, dan berfungsi sebagai pedoman bagi pendamping dalam menyertai dan menemani secara dekat, bersahabat, dan bersaudara serta terlibat bersama dalam suka dan duka, saling bahu membahu bersama warga belajar Kelompok Pemuda Produktif (KPP) dalam pengelolaan usaha kecil (konveksi bahan limbah kulit) sehingga kegiatan pembelajaran dan berusaha

dapat berjalan secara optimal yaitu warga belajar tumbuh menjadi seorang pemuda yang mandiri.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan dasar pemikiran penerapan model pembelajaran Kelompok Pemuda Produktif (KPP) melalui pendampingan dalam pengelolaan usaha kecil.
- b. Mendeskripsikan model pembelajaran Kelompok Pemuda Produktif (KPP) melalui pendampingan yang meliputi proses pembelajaran pada fase pembekalan, swakarsa, dan swadaya, serta hasil pembelajarannya.
- c. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan model pembelajaran Kelompok Pemuda Produktif (KPP) melalui pendampingan dalam pengelolaan usaha kecil.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Temuan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan model pendampingan pada program Kelompok Pemuda Produktif (KPP) dalam pengelolaan usaha kecil, sehingga berdasarkan temuan empiris ini kegiatan pendampingan dapat dikembangkan pada satuan-satuan pendidikan luar sekolah lainnya secara baik dalam prinsip adaptabilitas (penyesuaian).

Secara lebih rinci dapat dikemukakan bahwa temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dilihat dari aspek *teoritis* maupun *praktis*.

#### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi hasil kajian lapangan tentang pengembangan program pendidikan luar sekolah, khususnya tentang model pendampingan pada kelompok pemuda produktif dalam pengelolaan usaha kecil.
- b. Mengembangkan konsep atau teori-teori yang telah ada dalam pendidikan luar sekolah, khususnya teori pembelajaran.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran untuk mendukung hasil-hasil penelitian tentang pendidikan luar sekolah dalam objek dan kondisi yang berbeda.

#### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

- a. Pengembang, perencana, dan penyelenggara program pendidikan luar sekolah, sebagai masukan dalam kegiatan pengembangan dan uji coba, perencanaan, dan penyelenggaraan program-program pendidikan luar sekolah pemuda, dan olahraga (Diklusepora)
- b. Pengelola, penyelenggara KPP sebagai masukan dalam pengelolaan, penyelenggaraan program KPP khususnya pendampingan warga belajar pada program KPP dalam pengelolaan usaha kecil, agar kegiatan pembelajaran dan usaha dapat berjalan secara optimal.

- c. Sebagai masukan bagi pendamping dan tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan peran dan pemerannya masing-masing, sehingga kegiatan KPP dapat mencapai hasil optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Upaya pengembangan kemandirian dan kewirausahaan pemuda adalah layak dan mendesak untuk dilakukan melalui program-program yang realistis yang bermuara pada peningkatan produktivitas. Dewan Produktivitas Nasional, (dalam BPKB Jayagiri, 199; 12) mendefinisikan sumber daya manusia yang produktif adalah yang mempunyai sikap mental yang selalu mempunyai pandangan mutu kehidupan, bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini.

Sedangkan *National Productivity Board Singapore* menekankan bahwa produktivitas sebagai sikap mental (*attitude of Mind*) yang mempunyai semangat melakukan peningkatan atau perbaikan, Soedijarto (1997), mengatakan sikap mental yang produktif ditandai oleh; (1) motivatif, (2) disiplin, (3) kreatif, (4) inovatif, (5) dinamis, (6) profesional, (7) berjiwa kejuangan. Untuk menjawab tantangan dan penyiapan sumber daya manusia maka dikalangan generasi muda perlu ditumbuhkan kemampuan bersaing secara positif.

Pola pembinaan dan pengembangan kepemudaan adalah suatu model pendekatan dan pelatihan kepemudaan, bimbingan, pengawasan, pengadaan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, dan teratur serta bertanggungjawab untuk memperkenalkan, menumbuhkan, dan membimbing dasar kepribadian yang utuh, selaras, serasi, dan seimbang. Pemda Jabar, (1991). Sedangkan sasaran pembinaan dan pengembangan kepemudaan di Jawa Barat meliputi :

- a. meningkatkan keterampilan para pemuda putus sekolah dan pencari kerja untuk memberikan kemampuan berwirausaha secara mandiri;
- b. meningkatkan wawasan dan pengetahuan para pemuda melalui jalur pendidikan luar sekolah;
- c. tumbuhnya disiplin pribadi, sosial dan nasional serta etos kerja dan kemandirian;
- d. tercapainya sikap mental dan moral pemuda yang tangguh serta memiliki ketahanan nasional;
- e. meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pemuda dalam menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. berkembangnya fungsi dan peran organisasi kemasyarakatan fungsional pemuda yang mandiri, berkualitas dan dinamis;
- g. mengembangkan sarana dan prasarana pembinaan dan pengembangan kepemudaan disetiap daerah tingkat II;
- h. tertatanya kehidupan organisasi kemasyarakatan fungsional pemuda, organisasi kepemudaan lainnya seperti Karang Taruna, Pramuka, OSIS dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku. Pemda Jabar, (1991)

Kegiatan Pendampingan warga belajar adalah suatu proses pemberdayaan (Empowering Process), Kindervatter (1979) yakni proses peningkatan kemampuan pada diri seseorang, kelompok atau lembaga agar dapat memahami dan mengontrol kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan atau politik sehingga dapat memperbaiki kedudukannya di dalam masyarakat. Dalam hal ini pengertian kemampuan tersebut mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Dalam Pembelajaran proses pemberian kekuatan tersebut mempunyai delapan pokok, yaitu : (1) belajar dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil, (2) pemberian

tanggungjawab yang besar terhadap warga belajar selama kegiatan pembelajaran berlangsung, (3) kepemimpinan kelompok diperankan oleh warga belajar, (4) sumber belajar bertindak sebagai fasilitator, (5) proses belajar berlangsung secara demokratis, (6) adanya kesatuan pandangan dan langkah (dalam mencapai tujuan), (7) menggunakan metode dan teknik pembelajaran yang dapat menimbulkan rasa percaya diri dari warga belajar, dan (8) bertujuan akhir meningkatkan status sosial, ekonomi, dan atau politik warga belajar dalam masyarakat.

Pembelajaran menurut konsep Andragogi, pembelajaran bagi orang dewasa harus disadari sepenuhnya bahwa orang dewasa belajar bukan dengan cara digurui atau diajar. Orang dewasa lebih tepat dikatakan “dibimbing” untuk belajar. Adanya proses bimbingan yang dilakukan kepada orang dewasa diharapkan adanya perubahan perilaku. *“Perubahan perilaku bergantung dari perubahan sikap dan penambahan pengetahuan serta keterampilan”*. AG. Lunandi, (1993;15). Dengan demikian fungsi pembimbing adalah; (1) penyebar pengetahuan, (2) pelatih keterampilan, (3) perancang pengalaman belajar kreatif.

Belajar sebagai hasil dan proses, para pakar pendidikan dan psikologi masih belum seragam dalam memberikan pengertian tentang belajar. Pengertian yang dikemukakan oleh para pakar tersebut dilatar belakangi oleh empat faktor, yaitu: (1) latar belakang keluarga, (2) latar belakang pendidikan, (3) latar belakang lingkungan, (4) latar belakang pengalaman hidup Mozes. (1992). Seperti Gagne dalam D. Sudjana, (1993) mengemukakan bahwa belajar adalah “ perubahan disposisi atau kemampuan seseorang yang dicapai melalui usaha orang lain, dan perubahan itu



bukan diperoleh secara langsung dari proses pertumbuhan dirinya secara alamiah“. Apa yang dikemukakan Gagne pada dasarnya merupakan usaha yang disengaja oleh seseorang yang bertujuan untuk mencapai sesuatu perubahan yang ingin dicapai. Menurut Travers belajar adalah suatu proses yang menghasilkan penyesuaian tingkahlaku. Dari pengertian tersebut ada dua hal yang ditekankan (1) belajar sebagai proses dan (2) belajar sebagai hasil. Maksudnya dari proses pembelajaran diharapkan ada hasil yang diperoleh.

Philip H. Coombs dan Manzoor Akhmed (1989) berkeyakinan bahwa program-program pendidikan luar sekolah memiliki peran yang strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ruwiyanto, (1994;1) mengemukakan bahwa “pendidikan masyarakat merupakan salah satu penemuan paling menentukan dalam abad ini yang lebih hebat dari pendidikan formal, belum dihargai sebagaimana seharusnya. Pendidikan nonformal (pendidikan luar sekolah) dapat digunakan dengan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, untuk segala strata ekonomi, strata sosial, dan strata pendidikan, disamping dapat pula untuk ikut memecahkan masalah-masalah kemanusiaan yang mendesak atau meresahkan “.

Pengangguran disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor ekonomi, maupun sosial. Ruwiyanto, (1994;3) mengemukakan bahwa penyebab pengangguran adalah perubahan struktur industri, ketidakcocokkan keterampilan, ketidakcocokkan geografis, pergeseran demografis, kekuatan industri tidak bisa dipekerjakan, dan restrukturisasi kapital, ketidakcocokkan keterampilan sebagai salah satu penyebab pengangguran itu adalah masalah pendidikan. Ketidakcocokkan keterampilan yang

utama disebabkan oleh kelambatan penyesuaian program-program pendidikan atas perubahan lingkungan sehingga antisipasi pendidikan terhadap kebutuhan nyata (real need) lingkungan meleset.

Program program pendidikan luar sekolah yang inovatif baik dilihat dari isi, proses pembelajaran adalah merupakan suatu tuntutan yang mutlak dalam upaya ikut menyehatkan bangsa ini agar kita dapat kembali membangun dan mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Inovasi program atau gagasan baru program adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan program-program baru yang lebih efektif, efisien dan produktif untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Inovasi program perlu dilakukan sebagai upaya proaktif untuk menanggapi secara arif dan bijaksana terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dimasyarakat.

Program Pendampingan warga belajar Kelompok Pemuda Produktif (KPP) dalam pengelolaan usaha kecil adalah :

Usaha atau upaya seseorang yang menyertai dan menemani secara dekat, bersahabat, dan bersaudara serta terlibat bersama-sama dalam suka dan duka, saling bahu membahu dalam mengelola usaha kecil yang dilaksanakan pada kelompok pemuda produktif untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan yaitu usaha kecil yang maju dan berkembang, sehingga warga belajar memiliki mata pencaharian yang tetap dan akhirnya mandiri serta memperoleh pendapatan yang layak. BPKB Jayagiri, (1999;4)

Sedangkan menurut Binaswadaya (1999;1-2) mengemukakan bahwa pendampingan adalah “pihak yang berdekatan, samping menyamping, karena kedudukan antara keduanya sejajar atau sederajat, tidak ada bawahan atau pun atasan”. Hal ini mengandung implikasi bahwa pendamping hanya bisa memberikan

alternatif rekomendasi, dalam rangka pengembangan individu atau kelompok, dan ia tidak bisa mengambil keputusan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendampingan itu sendiri sebagai suatu proses pembelajaran yang partisipatif dan demokratis. Proses pembelajaran kelompok pemuda produktif dengan tiga fase pembelajaran yaitu ; (1) fase pembekalan, dilakukan melalui pelatihan, (2) fase swakarsa, dilakukan dengan pemagangan, (3) fase swadaya, yaitu kegiatan tindaklanjut merupakan kegiatan pemandirian warga belajar, untuk mencapai kemandirian itu perlu atau membutuhkan pendamping yang mampu memerankannya secara baik yaitu secara demokratis dan partisipatif.

Berangkat dari pengembangan prinsip individu warga belajar dan KPP pada umumnya, maka menurut Dit Diktentis Depdikbud (1999;13) proses pendampingan itu harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

(a) pendampingan merupakan proses penyadaran diri bagi semua pihak yang terlibat, (b) berkeyakinan bahwa kelompok dampingan, dalam dirinya mampu berkembang sesuai tujuannya, (c) kegiatan pendampingan bermaksud menciptakan situasi yang mendukung perkembangan kelompok, (d) pendekatan pendampingan berangkat dari lapisan paling bawah, (e) pendekatan pendampingan bermaksud menciptakan situasi yang mendukung perkembangan kelompok, (f) pendampingan berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya, (g) pendampingan dilaksanakan melalui kelompok dalam kelompok artinya pendampingan bukan secara pribadi tetapi atas nama suatu institusi, (h) pendampingan memprioritaskan pada partisipasi, kesetiakawanan dan kewaspadaan. Dit. Diktentis Depdikbud (1999;13)

Tujuan utama yang ingin diperoleh dari program pendampingan warga belajar pada program Kelompok Pemuda Produktif (KPP) dalam pengelola usaha kecil adalah, membantu warga belajar melalui proses pembelajaran agar dapat:

(1) meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menguasai

keterampilan berusaha, (2) membantu warga belajar agar memiliki mata pencaharian yang tetap dan produktif sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya, (3) memberikan kesempatan belajar pada warga belajar untuk memperoleh keterampilan berusaha pada kelompok pemuda produktif.



